

Rekonstruksi aturan kelembagaan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada SMAN 1 Kotagajah: penelitian berbasis soft systems methodology = Reconstruction of intitutional arrangements to increase students achievement at SMAN 1 Kotagajah : SSM based on action research

Dini Fridayanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348862&lokasi=lokal>

Abstrak

Kajian ini menyajikan ilustrasi rekonstruksi aturan kelembagaan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada SMAN 1 Kotagajah, Lampung Tengah. Peningkatan hasil belajar peserta didik ini direkonstruksi dengan basis kerangka kelembagaan bertingkat, dengan menggunakan model 'policy process as a hierarchy' sebagaimana diperkenalkan oleh Bromley. Kajian ini termasuk dalam SSM-based action research dengan kategori problem solving interest. Dengan pilihan ini, perubahan yang diinginkan dan mungkin dilakukan (feasible and desirable change) dengan mempertimbangkan systematically desirable, culturally feasible adalah pertimbangan di antara para pemilik masalah (problem owner). Hasil kajian menunjukan bahwa untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik tidak hanya melibatkan satu tingkat saja, melainkan memerlukan dukungan kebijakan bertingkat. Institutional arrangement mengatur bagaimana tingkat di bawahnya dapat berfungsi dengan baik.

.....This study represents an illustration of the reconstruction of Institutional Arrangements to improve the learning achievement for students at SMAN 1 Kotagajah, Central Lampung. The Improved learning process is reconstructed on the basis of the institutional multilevel framework, by using from the 'policy process as a hierarchy' model as introduced by Bromley. This study includes the SSM-based action research with problem solving interest categories. With this option, feasibility and desirable change is made possible systematically considering the desirability and also cultural feasibility of the proponents. The results of the study shows that improving student learning curve not only involves a single level, but requires the support of a multilevel policy framework, and institutional arrangement governing how the lower level to function properly.